

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan

#### 6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

##### 1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya memiliki rasa aman, tenteram dan tertib dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rasa aman yang dimiliki masyarakat meliputi aman dari:

- a. ancaman politik;
- b. ancaman bencana; dan
- c. ancaman ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat

Bentuk dari ancaman politik antara lain Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik; Pelanggaran HAM; isu politik. (catatan: konflik SARA dapat dikaitkan dengan kemunculannya pada saat Pemilu, Pilpres, Pilkada). Ancaman bencana, meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu 1) angka kriminalitas dan 2) Indeks Resiko Bencana, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

- a. Mencegah dan menurunkan terjadinya potensi konflik sosial melalui penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan partisipasi politik, peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan kewaspadaan dini serta deteksi dini.
- b. Mencegah dan menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui pelayanan penegakkan Perda dan Perbup yang humanis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana.
- d. Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran sesuai *response time* pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

2. **Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi budaya malu dan merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan, demokratis, transparan dan akuntabel. Birokrasi yang responsif dijalankan oleh aparatur yang memiliki mindset sebagai pelayan masyarakat, professional dengan sistem kerja yang terukur, memiliki etos kerja yang baik, kreatif, dan inovatif.

Misi kedua ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasar kebijakan manajemen resiko serta pengelolaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban sehingga terwujud *good governance*.
- b. Meningkatkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan kualitas/profesionalisme ASN, pembangunan berbasis elektronik dan kelembagaan yang berkualitas, peningkatan perwujudan Smart City.
- c. Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui kemudahan akses, mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan 2) program pembangunan pelayanan berkualitas

3. **Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang yang menerapkan nilai-nilai agama dalam laku hidup sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai agama, etika, budi pekerti, toleransi dan kecintaan pada budaya bangsa serta meneguhkan peran pondok pesantren dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter masyarakat. Selain itu misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dalam hal pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan

Misi ketiga ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) IPM (Indeks Pembangunan Manusia), 2) Indeks Kebudayaan, 3) Indeks kerukunan umat beragama, dan 4) angka kemiskinan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi,



menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi.

- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, Perbaikan gizi masyarakat, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK dan Pengendalian jumlah penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, peningkatan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan
- d. Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dalam mendukung masyarakat yang sehat melalui peningkatan partisipasi dan kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan dan partisipasi olahraga rekreasi serta prestasi olahraga
- e. Meningkatkan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, melalui Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
- f. Meningkatkan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang terintegrasi dengan pembangunan Desa Wisata.
- g. Meningkatkan nilai budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (iPemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan serta pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca.
- h. Menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan solidaritas umat beragama.
- i. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :
  - 1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK
  - 2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja
  - 3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit)
  - 4) Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat
- j. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan jejaring usaha, dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan akses permodalan.

k. Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi melalui :

- 1) Meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat, meliputi akses pendidikan, akses layanan kesehatan, akses sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, dan layanan dokumen kependudukan.
- 2) Mengurangi beban masyarakat dengan pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Bea Siswa Miskin (BSM), penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stimulasi jamban, Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 3) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan melaksanakan pelatihan keterampilan, pembinaan, pemberdayaan ekonomi.
- 4) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan fasilitasi permodalan, forum keberantaraan UMKM-perusahaan, FEDEP Mart.
- 5) Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berupa pengendalian inflasi daerah, komitmen untuk pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dan meningkatkan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan mental dan karakter

#### 4. **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI)

Misi keempat ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Indeks Desa Membangun, dan 2) Indeks ketimpangan antar wilayah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan potensi dengan kerjasama desa (Desa Sinergi) dan digitalisasi data serta layanan desa (Desa Digital).
- b. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, serta konektivitas dan komunikasi antar wilayah.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan desa yang menyeluruh, 2) Program pembangunan Badan Usaha Milik Desa yang Produktif, dan 3) Program penataan kota yang menyeluruh. Sedangkan program unggulan yang mendukung adalah DESI, DEDI dan KOIN.



## 5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. Potensi lokal Kabupaten Pemalang meliputi potensi pariwisata, potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, potensi home industry, potensi ekonomi kreatif. Misi ini ditempuh melalui penguatan koperasi dan UMKM; ekonomi kreatif; peningkatan keahlian, ketrampilan dan jiwa kewirausahaan; penguatan sektor pariwisata; serta dukungan terhadap kemudahan berusaha/investasi untuk meningkatkan daya saing.

Strategi pada misi ini juga mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang. Pada perpres ini disebutkan dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, yang selanjutnya disebut Kawasan Bregasmalang. Pembangunan industri Kabupaten Pemalang juga memperhatikan pengembangan kawasan industry terpadu Kabupaten Batang.

Misi kelima ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Pertumbuhan ekonomi dan 2) inflasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui :
  - 1) Peningkatan kapasitas industri kecil
  - 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri
  - 3) Rencana Pembangunan kawasan industri
  - 4) Penguatan SIINAS
- b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui :
  - 1) Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan
  - 2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak serta kesehatan ternak dan masyarakat veteriner.
  - 3) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
  - 4) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.
  - 5) penguatan penanganan bencana pertanian
  - 6) Fasilitasi ijin usaha pertanian.
- c. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi perikanan budidaya.
- d. Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen.



- e. Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan PAD melalui :
  - 1) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata sebagai obyek wisata baru
  - 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal
  - 3) Pengembangan jejaring dan pembentukan TIC (Tourism Information Center)
- f. peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, memberikan informasi peta potensi dan peningkatan promosi (era pandemi Covid) dalam investasi, pembangunan mall pelayanan public.

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program ekonomi kerakyatan, 2) Program pengembangan usaha yang sehat, kompetitif dan produktif. Sedangkan program unggulan yang mendukung adalah DEWI dan KOIN.

#### **6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Misi keenam ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh
- b. Peningkatan konektivitas melalui :
  - 1) Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata;
  - 2) Peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten;
  - 3) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, pemenuhan fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas, LPJU dan peningkatan kelaikan angkutan
- c. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS)
- d. Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan Perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi :
  - 1) Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan ;
  - 2) Pengawasan kualitas udara dan air;
  - 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);
  - 4) Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir



- 5) Penanganan limbah B3 (penyimpanan sementara)
- 6) Pengawasan usaha/kegiatan lingkungan sesuai dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disahkan
- 7) Penguatan kelompok masyarakat

Program prioritas yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah 1) Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan 2) Program Pembangunan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

## **6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang, ditetapkan arah kebijakan yang menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 masih fokus terhadap pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19, yang dilanjutkan di tahun 2023 sebagai penguatan dari kebijakan tahun 2022, dalam upaya Perwujudan Kabupaten Pemalang yang Aman dan Ngangeni ditahun 2026.

Dalam mencapai misi pembangunan maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

**Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,** dengan arah kebijakan

1. Pencegahan dan penurunan terjadinya potensi konflik sosial difokuskan pada pendidikan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pendidikan politik, peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam menangani masalah sosial, peningkatan kapasitas kewaspadaan dan deteksi dini, koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
2. Pencegahan dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan. Sedangkan untuk penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada penegakkan Perda dan Perbup sesuai SPM, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang humanis, koordinasi dan kerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Peningkatan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM
4. Peningkatan kualitas penanganan kebakaran sesuai SPM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, peningkatan sarana prasarana kebakaran, peningkatan pemberdayaan



masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, serta pembentukan relawan kebakaran.

**Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,** dengan arah kebijakan

1. Peningkatan akuntabilitas pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja dalam dokumen SAKIP
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dan akurasi data, kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil kelitbangan dan perencanaan berbasis spasial yang komprehensif.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada peningkatan penyelenggaraan pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu, peningkatan tindaklanjut hasil pengawasan, peningkatan pendampingan dan asistensi kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan.
5. Peningkatan pengelolaan arsip difokuskan pada penyediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan bahan pertanggungjawaban.
6. Peningkatan birokrasi yang kapabel dalam kepegawaian difokuskan pada peningkatan kompetensi ASN (struktural dan fungsional), melakukan upaya perwujudan merit System
7. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 (enam) pilar smart city serta peningkatan keterbukaan informasi publik (DEDI)
8. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat diantaranya melalui Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone), mobil pelayanan (moyan), pelaksanaan reses untuk menjamin diakomodirnya aspirasi masyarakat, pelayanan hasil kelitbangan dan pelaksanaan pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

**Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong,** dengan arah kebijakan

1. Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai SPM
2. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan JKN dan peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat





3. Peningkatan pengendalian penduduk difokuskan pada peningkatan partisipasi keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR)
4. Peningkatan kualitas gizi masyarakat difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan keanekaragaman pangan.
5. Peningkatan pembangunan pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi pemuda dan olahraga, fasilitasi sarana prasarana. Sport area untuk publik, peningkatan kualitas pemuda pelopor, dan kepramukaan
6. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak serta perwujudan kabupaten layak anak
7. Peningkatan pelestarian budaya difokuskan pada pelestarian warisan budaya tak benda berupa adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional dan tradisi lisan serta pelestarian warisan budaya benda berupa cagar budaya.
8. Peningkatan budaya literasi difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan pelayanan perpustakaan elektronik (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca di masyarakat.
9. Peningkatan solidaritas umat beragama difokuskan pada pencegahan dan deteksi dini potensi konflik agama, pelibatan semua elemen umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama yang dilakukan melalui diskusi pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
10. Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja
11. Peningkatan pendapatan masyarakat difokuskan pada penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk dan penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan
12. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial difokuskan pada pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, gelandangan dan ODGJ)

**Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan,** dengan arah kebijakan;

1. Pembangunan desa difokuskan pada pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa (Desa Sinergi) baik kerjasama antar desa,

kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dalam kawasan perdesaan, peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien (Desa Digital) menuju desa mandiri, peningkatan fasilitasi penataan desa, peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan mengoptimalkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

2. Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan.

**Misi 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal,** dengan arah kebijakan:

1. Pengembangan sentra industri difokuskan pada penguatan kluster dan industri berbahan baku lokal, pengembangan Kawasan Industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep KOIN (Kota Industri)
2. Peningkatan produksi pertanian difokuskan pada peningkatan sarana prasarana pertanian, peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, peningkatan penanggulangan bencana pertanian, fasilitasi izin usaha pertanian.
3. Peningkatan produksi perikanan difokuskan pada peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas TPI, perlindungan nelayan, peningkatan angka konsumsi Ikan (AKI)
4. Peningkatan perdagangan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui e-commerce, peningkatan kualitas produk standar ekspor.
5. Pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, pengembangan jejaring pemasaran dan kerjasama dengan sekolah Kabupaten Pemalang, pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual.
6. Pembangunan investasi difokuskan pada kemudahan perijinan dan pemberian insentif pada investor

**Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan,** dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM
2. Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan



3. Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata, pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan
5. Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan sistem informasi irigasi
6. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan system informasi tata ruang di pelayanan publik
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganan sampah

Tabel VI.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
<p><b>Tema</b> Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumberdaya manusia yang berkualitas</p>	<p><b>Tema:</b> Percepatan pembangunan infrastruktur dan Pemulihan ekonomi</p>	<p><b>Tema:</b> Peningkatan Perekonomian daerah dan kesejahteraan Masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur</p>	<p><b>Tema:</b> Peningkatan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada penguatan ekonomi kearifan lokal dan SDM yang berdaya saing didukung dengan infrastruktur yang merata</p>	<p><b>Tema:</b> Percepatan pembangunan yang berdaya saing dengan fokus inovasi dan penerapan teknologi yang didukung dengan infrastruktur yang kuat</p>	<p><b>Tema:</b> Pemantapan pembangunan ekonomi dengan fokus perwujudan pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kualitas SDM dengan infrastruktur yang mantap</p>
<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Pemulihan dampak Pandemi Covid 2) Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip Good Governances</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Pembangunan dan perbaikan jalan 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran 3) Pembangunan UMKM 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana 2) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 3) Penguatan Percepatan</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2) Fasilitas kemandirian desa dalam mewujudkan Desa Sinergi 3) Penguatan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dalam penataan kota</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Peningkatan penerapan teknologi dalam konsep Smart City 2) Peningkatan perencanaan yang inovatif 3) Peningkatan produktivitas ekonomi yang berkualitas dan berbasis teknologi dengan pengembangan</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b> 1) Pembangunan pariwisata yang mampu mendukung pendapatan asli daerah 2) Pemantapan desa mandiri dan maju 3) masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif. 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil</p>



**Arah Kebijakan**

2021	2022	2023	2024	2025	2026
<p>disertai dengan peningkatan pelayanan public</p> <p>4) Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana</p>	<p>5) Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata (DEWI)</p> <p>6) Penguatan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur</p> <p>7) Pembangunan kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang</p> <p>8) Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif</p>	<p>pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19</p> <p>4) Pengembangan Digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI)</p> <p>5) Penguatan Kebijakan Pemerintahan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur.</p> <p>6) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak</p>	<p>4) Pengembangan SDM berkarakter budaya Unggul</p> <p>5) Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehabsosial serta peningkatan ketrampilan pada penduduk miskin yang terdampak Pandemi COVID 19</p>	<p>jaringan pemasaran dalam e-commerce</p> <p>4) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif</p> <p>6) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah</p> <p>7) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif</p> <p>7) Memperkuat infrastruktur penunjang ekonomi terutama dalam distribusi</p> <p>8) Penanganan kemiskinan sesuai dengan program Rehabsos dan perlindungan</p>	<p><i>gender</i> dan ramah anak</p> <p>5) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah</p> <p>6) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul</p> <p>7) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah</p> <p>8) Pembangunan produktivitas ekonomi yang ber kualitas.</p> <p>9) Pemantapan infrastruktur perhubungan dalam mewujudkan konektivitas dengan daerah pariwisata</p> <p>10) Penanganan kemiskinan terintegrasi</p>

**6.3. Program Pembangunan Daerah**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 6.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Urusan dan Program Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat				
Meningkatkan ketertarikan dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban wilayah	Mencegah dan menurunkan terjadinya potensi konflik sosial melalui penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan partisipasi politik, peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan kewaspadaan dini serta deteksi dini	Kesbangpol	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		Mencegah dan menurunkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pelayanan penegakkan Perda dan Perbup yang humanis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Trantibum linmas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana	Trantibum linmas	Program Penanggulangan Bencana
		Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran sesuai <i>response time</i> pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	Trantibum linmas	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
<b>Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih</b>				
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasar kebijakan manajemen resiko serta pengelolaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan	Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3 pertanggungjawaban sehingga terwujud <i>good governance</i>	4 Perencanaan	5 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asisten Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip Program Kepegawaian Daerah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Keuangan	
			Pengawasan	
			Kearsipan	
			Kepegawaian	
	2 Meningkatkan Birokrasi Kapabel	Meningkatkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan kualitas/profesionalisme ASN, pembangunan berbasis elektronik dan kelembagaan yang berkualitas, peningkatan perwujudan Smart City	Kominfo	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Dukcapil	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan
			Setwan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Litbang	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<b>Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong</b>				
1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkeadilan	1) Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi.	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, Perbaikan gizi masyarakat, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan,	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengendalian Penduduk



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK dan Pengendalian jumlah penduduk dan Keluarga Berencana.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, distribusi pangan, peningkatan keanekaragaman pangan dan kemandirian pangan	Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dalam mendukung masyarakat yang sehat melalui peningkatan partisipasi dan kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan dan partisipasi olahraga rekreasi serta prestasi olahraga	Kepemudaan dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	3) meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, melalui Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan	PPPA	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Program Perlindungan Perempuan
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak
2 Meningkatkan nilai agama, budaya, toleransi dan karakter bangsa	5) Meningkatkan pelestarian budaya	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang terintegrasi dengan pembangunan Desa Wisata	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	6) Meningkatkan budaya literasi di masyarakat	Meningkatkan nilai budaya literasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (iPemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan serta pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan gemar membaca	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	7) Meningkatkan solidaritas keagamaan	Menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan solidaritas umat beragama	Kesbangpol	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
3 Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam penurunan pengangguran	<p>Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK</li> <li>2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja</li> <li>3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit)</li> <li>4) Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat transmigrasi</li> </ol> <p>Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro,</p>	<p>Tenaga Kerja</p> <p>Program Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p> <p>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p>	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan jejaring usaha, dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan akses permodalan		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM
		Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi melalui :		Program Pemberdayaan Sosial
		1) peningkatan kemampuan penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui program keluarga harapan, perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan sosial,		Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3 penguatan TKSK, perlindungan, jaminan sosial	4	5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
<b>Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan</b>				
Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan potensi dengan kerjasama desa (Desa Sinergi) dan digitalisasi data serta layanan desa (Desa Digital)	Permasdes	Program penataan desa
	Terwujudnya pengembangan Kota	Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Didukung: Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
			Didukung: LH	Program Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
			Perkim	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
			Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Kominfo	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
<b>Misi 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal</b>				
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam kemandirian ekonomi daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui :	Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		1) Peningkatan kapasitas industri kecil 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri		
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		3) Pengembangan kawasan industri		
		4) Penguatan SIINAS		
		Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui :	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		1) Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		3) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		4) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh		Program Perizinan Usaha Pertanian
		5) Fasilitasi izin usaha pertanian		Program Penyuluhan Pertanian
		6) penguatan penanganan bencana pertanian		
		Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya	Kelautan & Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
				Program Pengembangan Ekspor
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan
		Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen	Perdagangan	
		Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan PAD melalui : 1) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata sebagai obyek wisata baru 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal	Pariwisata	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		3) Pengembangan jejaring dan pembentukan TIC (Tourism Information Center)		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, memberikan informasi peta potensi dan peningkatan promosi (era pandemi Covid) dalam investasi, pembangunan mall pelayanan public,	Penanaman Modal	Program pengembangan iklim penanaman modal
				Program Promosi Penanaman Modal
				Program Pelayanan Penanaman Modal
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
<b>Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan</b>				
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan universal akses	Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Program Pengembangan Perumahan
			Perkim	Program Kawasan Perumahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan konektivitas melalui : 1) Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; 2) Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; 3) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan	PUPR	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	PUPR	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda	PUPR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang



Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
		RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang	Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penatagunaan Tanah
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi : 1) peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan ; 2) Pengawasan kualitas udara dan air; 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle); 4) Peningkatan pengelolaan sampah di Tempat pengolahan akhir 5) penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan) 6) pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin 7) penguatan kelompok masyarakat	Lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Urusan	Program
1	2	3	4	5
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan

**6.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan:

Tabel 6.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Urusan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat</b>						
Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	1) Angka kriminalitas	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban wilayah	1) Jumlah konflik sosial	Mencegah dan menurunkan terjadinya potensi konflik sosial melalui penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan partisipasi politik, partisipasi organisasi kemasyarakatan, dan	Pencegahan dan penurunan potensi konflik sosial difokuskan pada pendidikan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, peningkatan politik, pendidikan peran serta	Kesbangpol



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				<p>peningkatan kewaspadaan dini serta deteksi dini</p>	<p>organisasi masyarakat dalam menangani masalah sosial, peningkatan kapasitas kewaspadaan dan deteksi dini, koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)</p>	
			<p>2) Persentase adanya gangguan transtibumlinmas</p>	<p>Mencegah dan menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui pelayanan penegakkan Perda dan Perbup yang humanis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>	<p>Pencegahan dan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan serta pengawalan. Sedangkan untuk penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum difokuskan pada penegakkan Perda dan Perbup sesuai SPM,</p>	<p>Trantibum linmas</p>

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
					penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang humanis, koordinasi dan kerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
	2) Indeks Resiko Bencana					
		Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan mitigasi bencana, pelaksanaan rehab-rekon, peningkatan kapasitas relawan bencana dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana	Peningkatan pelayanan penanganan bencana difokuskan penanganan tepat waktu, pembentukan kelurahan/desa tangguh bencana dan pelayanan sesuai SPM	Trantibum linmas



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio kejadian kebakaran	Meningkatkan penanganan sesuai <i>response time</i> pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Peningkatan kualitas penanganan kebakaran sesuai SPM yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM pemadam kebakaran, peningkatan sarana prasarana kebakaran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, serta pembentukan relawan kebakaran	
<b>Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih</b>						
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	1) SAKIP 2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah 3) Manajemen Resiko Indeks	Meningkatkan pembangunan peningkatan perencanaan yang inovatif berdasar kebijakan manajemen resiko serta	Peningkatan akuntabilitas pembangunan difokuskan peningkatan kualitas pelaporan kinerja dalam dokumen SAKIP	Setda Keuangan Pengawasan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			4) Indeks Kearsipan	pengelolaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban sehingga terwujud <i>good governance</i>		Kearsipan
					Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dan akurasi data, kualitas perencanaan pembangunan perangkat daerah, peningkatan implementasi hasil kelitbangan dan perencanaan berbasis spasial yang komprehensif	Perencanaan
					Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada peningkatan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.	Keuangan





Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		2 Meningkatkan Birokrasi Kapabel	1) IPA (Indeks Profesionalitas ASN)  2) Indeks SPBE	Meningkatkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan kualitas/profesionalisme ASN, pembangunan dan kelembagaan elektronik dan kelembagaan yang berkualitas, peningkatan perwujudan Smart City	Peningkatan birokrasi yang kapabel dalam kepegawaian difokuskan pada peningkatan kompetensi ASN (struktural dan fungsional), melakukan upaya perwujudan merit System  Peningkatan kualitas system pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar smart city, peningkatan keterbukaan informasi publik (desa digital: DEDI)	Kepegawaian      Kominfo, Statistik, Persandian
		3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	rata rata indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik yang prima melalui kemudahan akses, mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada pelayanan berbasis teknologi dan inovasi yang didekatkan ke masyarakat	Dukcapil, Setwan, Litbang, kewilayahan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				pemanfaatan teknologi dan inovasi	diantaranya melalui Layanan Administrasi Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone), mobil pelayanan (moyan), pelaksanaan ases untuk menjamin diakomodirnya aspirasi masyarakat, pelayanan hasil kelitbangan dan pelaksanaan pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat	
<b>Misi 3: Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong</b>						
1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkeadilan	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)				
		1) Meningkatkan kualitas	1) rata-rata lama sekolah	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesadaran	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penanganan anak	Pendidikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan yang berdaya saing	2) Harapan lama sekolah	masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin, meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi.	usia sekolah yang tidak bersekolah serta peningkatan pelayanan pendidikan sesuai SPM	Pendidikan
		2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesehatan ibu dan anak, Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, Perbaikan gizi masyarakat, Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan	Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan JKN dan peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat	Kesehatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				<p>pemeliharaan kesehatan, Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK dan Pengendalian jumlah penduduk dan Keluarga Berencana.</p>	<p>Peningkatan pengendalian penduduk difokuskan pada peningkatan partisipasi keluarga berencana, peningkatan kesejahteraan keluarga dan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR)</p>	<p>Daldukk KB</p>
				<p>Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat, ketersediaan pangan, distribusi pangan, peningkatan keanekaragaman pangan dan keamanan pangan</p>	<p>Peningkatan kualitas gizi masyarakat difokuskan pada pencapaian pola pangan harapan, konsumsi seimbang (B2SA) dan keanekaragaman pangan</p>	<p>Pangan</p>

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dalam mendukung masyarakat yang sehat melalui peningkatan partisipasi dan kualitas dan daya saing pemuda dalam pembangunan dan partisipasi olahraga rekreasi serta prestasi olahraga	Peningkatan pembangunan pemuda dan olahraga difokuskan pada prestasi pemuda dan olahraga, fasilitasi sarana prasarana. Sport area untuk publik, peningkatan kualitas pemuda pelopor, dan kepramukaan	Kepemudaan dan olahraga
		3) meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, melalui Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender difokuskan pada implementasi kualitas perencanaan responsive gender, penyediaan data gender dan anak dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak serta perwujudan kabupaten layak anak	PPPA



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
2 Meningkatkan nilai nilai agama, budaya, toleransi dan karakter bangsa	1. Indeks Kebudayaan	1) Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang terintegrasi dengan pembangunan Desa Wisata	Peningkatan pelestarian budaya difokuskan pada pelestarian warisan budaya tak benda berupa adat istiadat, bahasa, manuskrip, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional dan tradisi lisan serta pelestarian warisan budaya benda berupa cagar budaya	Kebudayaan
		2) Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Nilai literasi budaya	Meningkatkan nilai literasi budaya melalui peningkatan kualitas perpustakaan, layanan perpustakaan elektronik (iPemalang), koleksi bacaan, pengoptimalan pelayanan serta pelaksanaan berbagai kegiatan gemar membacakan	Peningkatan literasi difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan pelayanan perpustakaan elektronik (iPemalang), peningkatan kegiatan	Perpustakaan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
					perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca di masyarakat	
	2. Indeks kerukunan umat beragama					
		Meningkatnya solidaritas keagamaan	Jumlah konflik agama	Menjaga kerukunan umat beragama melalui penguatan solidaritas umat beragama	Peningkatan solidaritas umat beragama pada difokuskan pada pencegahan dan deteksi dini potensi konflik agama, pelibatan semua elemen umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama yang dilakukan melalui diskusi pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kesbangpol

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
3 Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam penurunan pengangguran	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pengurangan jumlah pengangguran, melalui : 1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK 2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja 3) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit) 4) Peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Tenaga Kerja, Transmigrasi



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			2) PDRB per kapita	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan jejaring usaha, dan pengembangan usaha mikro serta peningkatan akses permodalan	Peningkatan pendapatan masyarakat difokuskan pada penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM	Koperasi & UMKM
				Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi melalui : 1) peningkatan kemampuan penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui program keluarga harapan, perlindungan dan jaminan sosial 2) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pemberdayaan sosial, penguatan TKSK, perlindungan, jaminan sosial	Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial difokuskan pada pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (Anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas dan gelandangan, ODGJ)	Sosial
<b>Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan</b>						

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1 Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota	2 1. Indeks Desa Membangun	3 Meningkatnya kemandirian desa	4 Persentase Desa Mandiri	5 Peningkatan desa melalui kemandirian desa melalui pengembangan potensi dengan kerjasama desa (Desa Sinergi) dan digitalisasi data serta layanan desa (Desa Digital)	6 Pembangunan difokuskan pada pengembangan potensi ekonomi melalui kerjasama desa (Desa Sinergi) baik kerjasama antar desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dalam kawasan perdesaan, peningkatan publikasi data serta layanan masyarakat yang efektif dan efisien (Desa Digital) menuju desa mandiri, peningkatan fasilitas penataan desa, peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan mengoptimalkan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	7 Permasdes



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
	2. Indeks Ketimpangan antar Wilayah	Terwujudnya pengembangan Kota	% Kecamatan yang memiliki infrastruktur lengkap	Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik, konektivitas komunikasi antar wilayah	Perwujudan kecamatan sebagai pusat pengembangan kawasan difokuskan pada pengurangan ketimpangan antar kecamatan.	PUPR Didukung: Perkim, LH, Perhubungan, Pariwisata, Perdagangan, Kesehatan, Pendidikan, Kominfo, Kewilayahan
<b>Misi 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal</b>						
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam kemandirian ekonomi daerah	1. Pertumbuhan ekonomi					
	2. inflasi	Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	1) % pertumbuhan sector industri pengolahan dalam PDRB	Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui : 1) Peningkatan kapasitas industri kecil 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri 3) Pengembangan kawasan industri 4) Penguatan SIINAS	Pengembangan sentra industri difokuskan pada penguatan kluster dan industri berbahan baku lokal, pengembangan Kawasan Industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep KOIN (Kota Industri)	Perindustrian



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			2) % pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB	<p>Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan holtikultura, perkebunan</li> <li>2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak serta kesehatan ternak dan masyarakat veteriner.</li> <li>3) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</li> <li>4) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh</li> <li>5) Penguatan penanganan bencana pertanian</li> <li>6) Fasilitasi ijin usaha pertanian</li> </ol>	<p>Peningkatan produksi pertanian difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, peningkatan penanggulangan bencana pertanian, fasilitasi ijin usaha pertanian.</p>	Pertanian
				<p>Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya</p>	<p>Peningkatan produksi perikanan difokuskan pada peningkatan pembedayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas TPI, perlindungan nelayan, peningkatan AKI (angka konsumsi lkan)</p>	<p>Kelautan &amp; Perikanan</p>

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
			3) % pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas sarana distribusi, peningkatan ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen	Peningkatan perdagangan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui e-commerce, peningkatan kualitas produk standar ekspor.	Perdagangan
			4) % Kontribusi Pariwisata dalam PAD	Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan PAD melalui : 1) Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata sebagai obyek wisata baru 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal 3) Peningkatan jejaring dan pembentukan TIC (Tourism Information Center)	Pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, pengembangan jejaring pemasaran dan kerjasama dengan sekolah Kabupaten Pemalang, pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual.	Pariwisata
		Meningkatnya realisasi	Pertumbuhan Nilai Realisasi	peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas	Pembangunan investasi difokuskan pada pengembangan iklim	Penanaman Modal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		penanaman modal	penanaman modal	pelayanan perijinan, memberikan informasi peta potensi dan peningkatan promosi (era pandemi Covid) dalam investasi, pembangunan mall pelayanan publik,	penanaman modal dan kemudahan perijinan serta pemberian insentif pada investor untuk meningkatkan investasi di kabupaten Pemalang	
<b>Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan</b>						
6.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya cakupan universal akses	% capaian universal akses	Peningkatan cakupan universal akses, melalui : peningkatan pelayanan air minum, akses pengelolaan sanitas lingkungan dan peningkatan penanganan kawasan kumuh	Peningkatan layanan air minum dan pengelolaan sanitasi difokuskan pada pelayanan sesuai dengan SPM  Penanganan kawasan kumuh difokuskan pada wilayah kumuh yang sudah ditetapkan dan pencegahan kumuh dengan fokus penanganan rumah	PUPR  Perkim



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Peningkatan konektivitas melalui : 1) Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; 2) Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; 3) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan	tidak layak huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan pelaksanaan SPM perumahan yang ditetapkan  Peningkatan kualitas jalan difokuskan pada jalan menuju akses perekonomian, desa wisata dan pelayanan pendidikan kesehatan	PUPR
					Peningkatan kualitas pelayanan perhubungan difokuskan pada kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan	Perhubungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Peningkatkan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Peningkatan pengelolaan kualitas irigasi difokuskan pada irigasi kewenangan kabupaten, pengembangan system informasi irigasi	
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	% pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	Peningkatan pembangunan sesuai tata ruang melalui penegakan perda RTRW dan peningkatan informasi tata ruang dan pola ruang	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang difokuskan pada penguatan sistem informasi tata ruang dalam pelayanan publik	PUPR, Pertanian
	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Udara</li> <li>2. Indeks Kualitas Air</li> <li>3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ol>	<p>Peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan ;</li> <li>2) Pengawasan kualitas udara dan air;</li> <li>3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce dan recycle);</li> <li>4) Peningkatan pengelolaan sampah di Tempat pengolahan akhir</li> <li>5) penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan)</li> <li>6) pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin</li> <li>7) penguatan kelompok masyarakat</li> </ol>	<p>Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran dan penanganannya</p>	Lingkungan Hidup



## **6.5. Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah**

Program unggulan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun kedepan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak sebagai berikut :

### **1. Desa Digital (DEDI)**

Pengembangan Desa Digital (DEDI), merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk implementasi DEDI diantaranya adalah pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian data potensi desa dan pemanfaatannya sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan desa melalui teknologi digital dan internet yang didukung penguatan keamanan sistem informasi. Adapun layanan dan data desa yang akan dikembangkan meliputi data dan layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), data penataan wilayah, data dan layanan mitigasi bencana, data pendidikan (anak tidak sekolah), data kemiskinan (DTKS), layanan pengelolaan keuangan desa, data regulasi desa dan layanan pengelolaan desa wisata.

Implementasi lain dari DEDI adalah pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Adapun layanan yang akan dikembangkan dan didorong pemanfaatannya oleh lembaga desa dan masyarakat adalah Layanan Desa Mandiri (LDM), layanan desa wisata digital, pemanfaatan aplikasi kependudukan LAKONE, pemanfaatan website desa dan media sosial desa serta fasilitasi menuju Desa Pintar. Adapun enam pilar keberhasilan penerapan Desa Pintar (*smart village*) adalah : (1) *smart people*, yaitu masyarakat pintar terkait kreativitas dan modal sosial; (2) *smart economy*, yaitu ekonomi pintar berupa inovasi dan persaingan; (3) *smart environment*, yaitu lingkungan pintar meliputi keberlanjutan dan sumber daya; (4) *smart governance*, yaitu pemerintahan yang cerdas sebagai agen pengubah, pemberdaya, dan partisipan; (5) *smart life*, yaitu cerdas hidup berupa kualitas hidup dan kebudayaan; dan (6) *smart mobility*, yaitu mobilitas pintar dalam hal transportasi dan infrastruktur.

### **2. Desa Sinergi (DESI)**

Pengembangan Desa Sinergi (DESI), merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

Bentuk implementasi DESI diantaranya adalah :



- (1) Sinergitas antar lembaga desa maupun dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana di desa.
- (2) Sinergitas antar desa (lebih dari satu) lintas kecamatan di kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana di desa.
- (3) Sinergitas antara desa dengan desa dalam kawasan perdesaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana di desa.
- (4) Sinergitas antar lembaga desa dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana di desa, baik yang merupakan prakarsa desa maupun prakarsa pihak ketiga.

### 3. Desa Wisata (DEWI)

Mengacu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Desa Wisata sebagai bagian dari destinasi wisata merupakan salah satu *core business* dari industri pariwisata di daerah. Desa Wisata merupakan sebuah tempat atau wilayah yang mempunyai keunggulan dan ciri khas, baik secara geografi maupun budaya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menikmatinya. Untuk membuat sebuah desa wisata yang unggul, sebelum diperkenalkan dan dijual, terlebih dahulu harus mengkaji 4 aspek utama yang harus dimiliki, yaitu *Attraction* (Atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenity* (Fasilitas pendukung) dan *Ancillary* (organisasi yang mengurus destinasi).

Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. *Accessibility* atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi. *Amenity* atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan



dan diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Sedangkan *Ancillary* berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut.

Pengembangan Desa wisata merupakan upaya untuk dapat menghidupkan budaya, tradisi atau lingkungan adat sebagai salah satu komoditas wisata budaya lokal dan menjaga kelestariannya serta untuk meningkatkan pendapatan desa. Adapun manfaat desa wisata dari aspek ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan menjual produk olahan atau souvenir, aspek sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, aspek lingkungan dengan meningkatkan kepedulian masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dan asri dan aspek budaya dengan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga seni budaya.

Mengacu pada Buku Pedoman Desa Wisata Kementerian Pariwisata Edisi I Tahun 2019, Pengembangan Desa Wisata meliputi 4 tahapan, yaitu :

- a. Tahap Rintisan, yang di tandai dengan kondisi :
  - Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
  - Pengembangan Sarana prasarana wisata masih terbatas
  - Belum ada / masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar
  - Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
  - Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)
- b. Tahap Berkembang, yang di tandai dengan kondisi :
  - Sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah
  - Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata
  - Mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat
  - Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh
  - Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)
- c. Tahap Maju, yang di tandai dengan kondisi :
  - Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya
  - Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan termasuk wisatawan mancanegara
  - Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai
  - Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/keompok kerja lokal
  - Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata



- d. Tahap Mandiri, yang di tandai dengan kondisi :
- Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri
  - Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep berkelanjutan yang diakui oleh dunia
  - Sarana dan prasarana sudah mengikuti Standar internasional semisal ASEAN
  - Pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara Kolaboratif antar sektor *pentahelix* (akademisi, bisnis, *community*, pemerintah, media) berjalan dengan baik
  - Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata
  - Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri

Saat ini Kabupaten Pemalang memiliki 27 Desa Wisata yang sudah di SK kan Bupati Pemalang, meliputi 3 Desa wisata mendekati kategori maju, 13 Desa Wisata berkembang dan 11 Desa wisata rintisan. Target 5 tahun ke depan, Desa wisata Maju akan bertambah menjadi 5 desa, Desa Wisata Berkembang menjadi 20 Desa dan Desa Wisata rintisan menjadi 2 Desa.

Untuk mencapai hal tersebut, maka selama periode RPJMD Tahun 2021-2026, program yang akan dioptimalkan adalah :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa wisata. Dinas Pariwisata yang akan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Disperkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Program Pemasaran Pariwisata untuk mempromosikan obyek-obyek wisata di tingkat lokal, regional dan nasional. Dinas Pariwisata akan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pemberdayaan ekonomi kreatif, akan berkolaborasi dengan Diskop, UMKM dan Perindag Bappeda serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk peningkatan kapasitas pengelola dan unsur pendukung pelaku desa wisata, dimana Dinas Pariwisata akan berkolaborasi dengan Diskop, UMKM dan Perindag serta Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### 4. Kota Industri (KOIN)

Pembangunan Kota Industri dapat menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi daerah apabila industri skala besar dapat bersinergi dengan industri lokal sehingga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) dan pengaruh pengumpulan kekuatan (polarisasi) lokal yang sangat besar. Kota industri itu basisnya masyarakat ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas guna mendukung pertumbuhan sehingga dapat bekerjasama dengan industri skala besar.

Sektor usaha di kota Industri diharapkan menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kota tersebut serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pada saat ini Kabupaten Pemalang sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2018 tentang RT RW Kabupaten Pemalang tahun 2018 sampai dengan 2038 dan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang (RPIK). Kedua Perda ini yang akan digunakan sebagai langkah awal untuk menyusun pembangunan kawasan industri baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang.

Target Kota Industri yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang periode 2021-2026 adalah mewujudkan pembangunan kota industri di Kabupaten Pemalang dengan segala potensi yang dimiliki. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

1. Penentuan lokasi kawasan industri sesuai dengan Perda Tata Ruang;
2. Kemudahan pelayanan perijinan dan investasi
3. Kajian Pra Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri dan Kajian rencana Induk pembangunan kawasan industri (Amdal, Andalalin, RKL, RPL, IPAL dan RTH)
4. Penyusunan Masterplan kawasan Industri, penyusunan DED, penyiapan sarana prasarana dan Penyediaan PSU
5. Analisis Kelayakan Finansial, Penyiapan Kelembagaan Kawasan Industri, Peningkatan Diversifikasi Produk dan kemampuan inovasi dan pengembangan teknologi produksi serta Fasilitasi izin industri IKM
6. Pendidikan dan Pelatihan SDM yang berkompetensi di bidang industri (sertifikasi kompetensi)
7. Renovasi Rumah Kreatif.

Untuk mewujudkan Kota Industri (KOIN), perlu berkolaborasi dan peran serta dari Perangkat Daerah yang terkait yaitu DPUPR, Disperkim, Diskoperindag, DPMPTSP, DLH, Disnaker dan Bagian Tata Pemerintahan Setda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program, kegiatan dan sub kegiatan.



Tabel 6.4. Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	Desa Digital (Dedi)	3	4	5	6
1	Desa Digital (Dedi)	<p>Program ini merupakan pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian data potensi desa dan pemanfaatannya sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangan melalui teknologi digital dan internet yang didukung penguatan keamanan sistem informasi.</p>	<p>Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) berupa pengolahan data potensi desa meliputi data pemerintahan desa, pembangunan desa, kelembagaan desa dan lain-lain.</p>	<p>Dinpermasdes, Setda (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa), 14 kecamatan</p>	<p>Dinpermasdes sebagai penanggung jawab Dedi</p> <p>Melalui Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (Puspindes)</p>
			<p>Single data desa sistem didukung dengan penguatan keamanan sistem.</p>	Diskominfo	
			<p>Pengembangan metode pemasaran untuk potensi desa</p>	Diskoperindag	<p>Kerjasama dengan marketplace dan pembangunan portal lokal untuk mengetahui arus transaksi hasil produk potensi desa melalui UMKM</p>
			<p>Fasilitasi penataan wilayah secara digital</p>	Diskominfo, DPU TR	<p>Embrio detail tata ruang desa secara digital</p>
			<p>Pengembangan menu untuk sistem mitigasi bencana</p>	Diskominfo, BPBD	<p>EWS atau pemanfaatan IoT</p>
			<p>Pengembangan menu untuk informasi pasar kerja online</p>	Disnaker	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemanfaatan data Anak Tidak Sekolah (ATS) Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Data regulasi desa Peningkatan kapasitas "server" sebagai data desa <i>storage</i> Pengembangan Layanan pada Masyarakat Desa secara Mandiri (LDM) Fasilitasi implementasi layanan pada masyarakat oleh Fasilitator Administrasi Desa di tingkat Desa	Dindikbud 14 kecamatan Setda (Bagian Hukum), Dinpermasdes, Diskominfo Diskominfo Diskominfo, Dinpermasdes Disdukcapil	Sebagai kontrol KPM bantuan sosial di tingkat desa Himpunan data regulasi desa
2	<b>Desa Sinergi (Desi)</b>	Program ini merupakan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat desa secara sinergis melalui pendataan, perencanaan pembangunan desa, dan penanganannya  - <i>Sinergitas antar lembaga desa maupun dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan bencana di desa</i>	Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian/pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur  Fasilitasi sinergitas masyarakat dan lembaga desa dalam upaya penanggulangan bencana  Fasilitasi sinergitas masyarakat dan lembaga desa dalam menjaga lingkungan	Dinpermasdes, 14 kecamatan  BPBD  DLH	Fasilitasi sinergitas partisipasi masyarakat, lembaga desa dan Pemdes; perencanaan anggaran pembangunan; pengadaan barang jasa di desa  Fasilitasi sinergitas masyarakat, lembaga desa dan Pemdes

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			<p>Fasilitasi sinergitas masyarakat dan lembaga desa dalam upaya penanggulangan bencana</p> <p>Fasilitasi sinergitas masyarakat dan lembaga desa dalam menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan</p> <p>Fasilitasi sinergitas masyarakat dan lembaga desa dalam mewujudkan peningkatan ekonomi di desa dengan atau tanpa teknologi terbaru maupun TTTG</p> <p>Fasilitasi kesadaran dalam menjaga kesehatan masyarakat</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga desa pada perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar desa</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar desa dalam pengendalian lingkungan hidup (tangani sampah, penghijauan, SPAL / limbah cair)</p> <p>Fasilitasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian/pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur</p>	<p>Kecamatan, BPBD</p> <p>DLH</p> <p>Dinpermasdes, Dipertan</p> <p>Dinkes</p> <p>Dinpermasdes, kecamatan</p> <p>DLH</p> <p>Dinpermasdes</p>	<p>Fasilitasi sinergitas masyarakat, lembaga desa dan Pemerintah Desa</p> <p>Memutus mata rantai pemasaran hasil produksi/panen (stop ijon), perkuat UMKM oleh unit usaha Bumdes, latih UMKM; latih dan kembangkan usaha melalui Bumdes dan dana desa, fasilitasi Perangkat Daerah pada bumdes sebagai agency pabrikaan, dan kelola limbah organik</p> <p>Sinergitas LKD/Posyandu dengan masyarakat desa</p> <p>14</p> <p>DLH agar menyediakan mesin cacah plastik untuk LDPE sebagai bahan aspal</p> <p>Fasilitasi sinergitas partisipasi masyarakat, lembaga desa dan Pemdes dalam perencanaan anggaran pembangunan dan pengadaan barang jasa di desa</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			<p>Fasilitasi kerjasama antar desa penanaman modal dalam usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama</p> <p>Fasilitasi kerjasama desa dalam pengelolaan atau penyediaan kebutuhan air (air bersih ataupun air utk pertanian) bagi masyarakat</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar desa dalam pengelolaan tanah kas desa atau aset desa lainnya</p> <p>Fasilitasi pengembangan usaha BUMDes Bersama dalam kawasan perdesaan</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar desa dalam upaya penanggulangan bencana</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar desa dalam menjaga keamanan lingkungan, ketertiban dan perlindungan masyarakat antar desa</p> <p>Fasilitasi kerjasama antar desa dalam pemanfaatan teknologi terbarukan atau TTG</p> <p>Fasilitasi pengembangan usaha di BUMDes Bersama dalam Kawasan Perdesaan</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas BKAD dengan bidang yang dikerjasamakan di Kawasan Perdesaan</p> <p>Fasilitasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun NGO/LSM di Kawasan Perdesaan</p>	<p>Dinpermasdes</p> <p>DPU TR</p> <p>Dinpermasdes</p> <p>Diskoperindag</p> <p>Satpol PP</p> <p>Satpol PP, Dinpermasdes</p> <p>Dinpermasdes</p> <p>Dinpermasdes</p> <p>OPD terkait</p> <p>Bakesbangpol, Bappeda</p>	<p>6</p> <p>PKP Belik, Pulosari, Bodeh, Ulujami dan Pemalang</p> <p>KKN Tematik, penelitian dan pendampingan</p>



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>Fasilitasi penanggulangan bencana di desa-desa dalam Kawasan Perdesaan</p> <p>Fasilitasi peningkatan kapasitas Pengelola unit usaha ekonomi produktif di Kawasan Perdesaan</p> <p>Fasilitasi pelatihan bagi tenaga kerja produktif dan penempatan tenaga kerja dari desa</p> <p>Fasilitasi peluang investasi pihak ketiga (<i>prakarsa desa maupun prakarsa pihak ketiga</i>)</p> <p>Fasilitasi penanggulangan bencana di desa</p> <p>Penyediaan dan pengelolaan jaringan internet untuk pelayanan masyarakat</p> <p>Penyiapan, Pembinaan, Pendampingan Desa Wisata</p>	<p>BPBD</p> <p>Diskoperindag</p> <p>Disnaker</p> <p>Dispartan, DPM PTSP</p> <p>BPBD</p> <p>Bapenda</p> <p>Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</p>	<p>PKP Pulosari dan Ulujami</p> <p>PKP Belik, Pulosari, Bodeh, Ulujami dan Pemalang</p> <p>Melalui anggaran desa dan atau sharing anggaran</p>	
3	<b>Desa Wisata (DEWI)</b>	<p>Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.</p>			<p>Pendampingan dan Pembinaan kelembagaan pengelola desa wisata, peningkatan SDM pengelola desa Wisata, Promosi dan pemasaran Desa Wisata</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>Target pengembangan desa wisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Wisata Maju (dari 3 desa menjadi 5 desa)</li> <li>- Desa Wisata Berkembang (dari 13 menjadi 20 desa)</li> <li>- Desa wisata rintisan (dari 11 menjadi 2 desa)</li> </ul> <p><i>Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan desa wisata</i></p>	<p>Koordinasi dengan stakeholder terkait pengembangan desa wisata</p> <p>Pendampingan dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam pengoptimalan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata</p> <p>Pengembangan Paket Desa Wisata</p>	<p>Unsur penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)</p> <p>Unsur Pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Unsur Pemerintah Bidang Pariwisata</p> <p>Unsur Pemerintah Bidang Pariwisata</p>	
			<p>Penyiapan Fasilitas Pendukung sarana prasarana desa wisata (mushola, toilet, aula, homestay, penataan parkir, prasarana digitalisasi, TIC)</p> <p>Pendampingan dan pembinaan pemerintahan desa</p> <p>Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata (Fasilitasi PKS dengan BKSDA, Legalitas, Perbup)</p>	<p>Unsur Kewilayahan</p> <p>Unsur Pemerintahan dan Bidang Pariwisata dan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah</p>	
			<p>Penyiapan dukungan infrastruktur jalan akses masuk desa wisata</p>	<p>Unsur Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penyiapan dukungan infrastruktur jalan lingkungan desa wisata	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	bidang
			Penyiapan dukungan Infrastruktur pengelolaan sampah di desa wisata	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Penyiapan dukungan sarana dan prasarana lampu penerangan jalan dan gapura identitas	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penyiapan dukungan Penyediaan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) untuk akses menuju desa wisata dan penanda arah dalam kawasan desa wisata	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
			Penyiapan dukungan akses internet pada desa wisata	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	
			Penyediaan fasilitas kebersihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar tentang pengolahan limbah domestik	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		<i>Mempromosikan obyek-obyek wisata di tingkat lokal, regional dan nasional</i>	Melakukan Promosi dan Pemasaran Pariwisata ( Paket Wisata Terpadu Kawasan, Penyediaan Media Promosi, Penyelenggaraan Event, Fumtrip, Duta Wisata, Tour de Pemalang)	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
		<i>Pengembangan Ekonomi kreatif dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pemberdayaan ekonomi kreatif</i>	Pendampingan dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Sektor Ekonomi Kreatif (UMKM Ekraf)	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif di Desa Wisata	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengembangan sektor Ekraf	Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		<i>Peningkatan kapasitas pengelola dan unsur pendukung pelaku desa wisata</i>	Pendampingan Produk UMKM Lokal desa wisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
			Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja Bidang Pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM Ekraf dan Pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
			Pendampingan dan fasilitasi termasuk pemasaran pelaku usaha UMKM hasil perikanan lokal	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
			Pendampingan dan fasilitasi termasuk pemasaran pelaku usaha UMKM hasil Pertanian lokal	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
			fasilitasi perijinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
			Fasilitasi 5 klaster di FEDEP	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
			Sosialisasi/Pemberdayaan masyarakat sadar wisata	Unsur penunjang urusan Pemerintahan (Perencanaan)	
4	<b>Kota Industri (Koin)</b>	Kota Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		perusahaan kawasan industri. Kota Industri dalam definisi tersebut merupakan tempat berlangsungnya kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.			
		Menyusun rencana pembangunan kawasan industri	Koordinasi dengan stakeholder terkait rencana pembangunan kawasan industri	Urusan unsur penunjang (Perencanaan)	Dilaksanakan Tahun 2021
			Analisis Kelayakan Finansial (NPV dan FIRR)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
			Kajian Rencana pembangunan kawasan industri	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023 dan 2024
			Penyusunan Masterplan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Penyusunan DED	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Fasilitasi pengurusan izin (Amdal, RKL, RPL, KLHS, IPAL, RTH)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Penyiapan Lahan	Investor	
			Penyiapan sarana prasarana jaringan listrik	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penyiapan sarana prasarana jaringan jalan, air, parkir, bongkar muat dan rumah tinggal pengelola	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023 dan 2024
			Penyiapan dokumen Andalalin	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dilaksanakan Tahun 2023
		Pembinaan dan Pendampingan Sentra industri kecil dan menengah (IKM)	Sosialisasi dan Fasilitasi Badan Hukum Sentra IKM	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023 dan 2024
			Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung sentra IKM	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
		Penyediaan rumah kreatif	Penyediaan Calon Rumah Kemasan Industri Kecil menengah (rumah kreatif)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2023
			Penyediaan Sarpras Calon Rumah Kemasan Industri Kecil menengah (rumah kreatif)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2023, 2024
			Pelatihan SDM Pengelola Rumah Kemasan Industri Kecil menengah	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2023, 2024
		Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusia untuk memenuhi kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan	Peningkatan Diversifikasi Produk dan Kemampuan Inovasi dan Pengembangan Teknologi Produksi	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
			Pendidikan dan Pelatihan SDM yang berkompetensi di Bidang Industri (sertifikasi kompetensi)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
			Identifikasi kebutuhan tenaga kerja dibutuhkan	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023, 2024



No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pendidikan dan Pelatihan SDM yang terlatih (Siap Kerja)	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Pendidikan dan Pelatihan penyebarluasan kesempatan kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Pelaksanaan Bursa Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Penyiapan Kelembagaan Kawasan Industri (FGD)	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Fasilitasi Ijin Industri, Merek, Halal, BPOM, SNI dsb	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, IPKI	Penyediaan Sistem Informasi Industri Pemalang (SIIPEL) dan Sarana Prasarana Pendukung	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Penyediaan Tenaga Ahli dan Petugas Pengelola Sistem Aplikasi Industri Pemalang	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Industri Terkait Digitalisasi Industri dan Sistem Industri Pemalang dan SIINAS / Nasional	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dilaksanakan Tahun 2022
		Mengembangkan iklim penanaman modal melalui pematkahiran data dan informasi profil investasi dan pemberian insentif penanaman modal	Pemutakhiran data dan informasi terkait profil potensi, peluang dan daya dukung investasi	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penyesuaian regulasi daerah terkait perizinan dan pemberian insentif	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Implementasi Pemberian Insentif	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2023,2024
		Mempromosikan kawasan industri dan potensi unggulan dengan melakukan pameran, temu bisnis dan promosi melalui media sosial	Pameran investasi dengan mempromosikan kawasan industri dan potensi unggulan Kabupaten Pemalang	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Kegiatan temu bisnis	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
		Program ini dilakukan untuk pelayanan perijinan. Konsultasi dan pengaduan masyarakat serta koordinasi dan sinkronisasi	Peningkatan kualitas pelayanan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses perijinan	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
			Koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka pemberian insentif Fasilitas Perpres 79 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Kawasan Energi Terpadu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024
		Menunjang pelayanan modal	Pembangunan Mal Pelayanan Publik dengan merchab gedung kantor DPMTSP dan sarana prasarana dasar untuk Mal Pelayanan Publik	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2022
		Fasilitasi untuk Izin lingkungan dan izin usaha kawasan industri.	Pra kelayakan pengembangan kawasan industri	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
		Program ini dilakukan dengan peninjauan kerjasama daerah baik kepada pemerintah daerah lain maupun badan usaha dalam rangka rencana pembangunan kawasan industri.	Fasilitasi kerjasama daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023,2024

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3 Program ini dilakukan dengan memperluas promosi penanaman modal dan promosi investasi kepada masyarakat luas.	4 Promosi Penanaman Modal	5 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6 Dilaksanakan Tahun 2022, 2023, 2024
			Promosi Investasi	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dilaksanakan Tahun 2024
		Program ini dilakukan sebagai upaya kepedulian sosial dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam menunjang produktivitas di kawasan industri	Sosialisasi pemberdayaan masyarakat sekitar	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dilaksanakan Tahun 2024
		Program ini dilakukan dengan mengawasi penegakan peraturan daerah di kawasan industri.	Pelaksanaan Tata tertib kawasan industri	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dilaksanakan Tahun 2022, 2023, 2024